

# Strategi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Publik yang Berkelanjutan

**Qinayyah Awaliyah<sup>1</sup>, Almas Ardiansyah<sup>1</sup>, Dyah Ayu Lestari<sup>1</sup>, Muhammad Shaumi Rizqy<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

## ABSTRACT

This study aims to examine community-based education management implementation strategies for enhancing public involvement and to analyze the challenges affecting their success. The research employs a qualitative approach through an integrative literature review, analyzing scientific journals, education policy documents, and synthesizing various literature-based case studies relevant to community-based education. Data were analyzed descriptively through a process of reduction, categorization, synthesis, and interpretation of findings. The results indicate that increased public engagement can be achieved through several key strategies, namely mapping community needs in educational planning, strengthening school-community communication forums, empowering school committees, involving the community in program evaluation processes, capacity-building support for the community, and the application of transparency and accountability in educational management. These strategies contribute to an increased sense of ownership, public trust, and the relevance of educational programs to local needs. However, their implementation still faces challenges such as low community educational literacy, resource constraints, regional disparities, weak coordination among stakeholders, and the dominance of certain groups in decision-making. These findings imply that public engagement needs to be institutionalized through structured participatory mechanisms, supported by community capacity building, transparent governance, and sustainable collaboration between schools, communities, and the government.

 OPEN ACCESS

## ARTICLE HISTORY

Received: 01-08-2026

Revised: 24-08-2026

Accepted: 26-08-2026

## KEYWORDS

community-based education, public engagement, community participation, community empowerment, education governance

## Corresponding Author:

Qinayyah Awaliyah

Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: [qinayyahnaya@gmail.com](mailto:qinayyahnaya@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pendidikan yang partisipatif. Namun, dalam praktiknya partisipasi masyarakat masih sering bersifat administratif dan terbatas pada dukungan dana, tenaga, atau kehadiran dalam kegiatan sekolah. Masyarakat lebih sering ditempatkan sebagai pendukung program pendidikan daripada sebagai mitra yang terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Akibatnya, keterlibatan publik belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan (Dewi & Suriansyah, 2025).

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks desentralisasi pendidikan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam kerangka tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan (Cahyani et al., 2024; Suparlan, 2022).

Salah satu pendekatan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang tumbuh dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, manajemen pendidikan berbasis masyarakat memiliki cakupan yang lebih spesifik, yaitu pengelolaan pendidikan yang secara sistematis melibatkan masyarakat dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Dengan demikian, fokus utamanya tidak hanya pada keberadaan masyarakat dalam pendidikan, tetapi juga pada bagaimana keterlibatan tersebut diorganisasikan dan dilembagakan dalam proses manajemen pendidikan (Ruslan, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Ariani & Sholeh (2025) menjelaskan bahwa sinergi antara sekolah dan masyarakat dapat memperkuat implementasi program pendidikan berbasis partisipasi. Penelitian Fuad (2012) di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Bandung menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat mampu memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitar, meskipun pengambilan keputusan masih banyak dipengaruhi oleh figur pemimpin. Penelitian Dewi & Suriansyah (2025) juga menunjukkan adanya perbedaan kapasitas partisipasi masyarakat antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang dipengaruhi oleh akses sumber daya dan

informasi pendidikan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan kultural.

Meskipun penelitian mengenai pendidikan berbasis masyarakat telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek konseptual, bentuk partisipasi masyarakat, atau pentingnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Penelitian yang secara khusus menjelaskan strategi implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat berdasarkan fungsi manajemen pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan mekanisme konkret untuk meningkatkan keterlibatan publik secara substantif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari argumen bahwa manajemen pendidikan berbasis masyarakat hanya dapat berjalan efektif apabila keterlibatan publik dilembagakan melalui mekanisme yang jelas, terstruktur, dan partisipatif, bukan sekadar melalui ajakan berpartisipasi atau dukungan administratif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat dalam meningkatkan keterlibatan publik, menganalisis tantangan yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menjelaskan implikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan melalui pendekatan studi literatur.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur integratif yang dipadukan dengan studi kasus empiris di Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Sulthon Aulia. Studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu unit analisis, seperti individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau komunitas, dalam konteks aktual dan pada waktu tertentu (Budiyanto et al., 2025). Sumber data penelitian meliputi literatur ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, dan data empiris dari PPM Sulthon Aulia. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, portal jurnal nasional, dan situs resmi pemerintah menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan manajemen pendidikan berbasis masyarakat dan keterlibatan publik. Sumber yang digunakan diprioritaskan pada publikasi tahun 2020–2026, namun beberapa referensi sebelumnya tetap digunakan sebagai landasan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi terbatas pada PPM Sulthon Aulia dan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data

Kriteria inklusi sumber literatur dalam penelitian ini meliputi: (1) jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review; (2) dokumen kebijakan resmi pemerintah yang

berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dan partisipasi masyarakat; (3) buku referensi akademik dari penerbit terpercaya; serta (4) laporan penelitian atau studi kasus yang membahas implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat secara spesifik. Adapun kriteria eksklusi mencakup: artikel opini tanpa dasar empiris atau teoretis yang memadai, sumber yang tidak dapat diverifikasi kredibilitasnya, serta publikasi yang tidak relevan dengan fokus kajian meskipun menggunakan terminologi yang serupa. Dari proses seleksi ini, sebanyak  $\pm 30$  sumber dianalisis secara mendalam, terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan pendidikan, serta buku referensi. Kemudian keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari literatur dan hasil pengamatan di lapangan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, sintesis lintas sumber, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola serta temuan terkait implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat.

## **Hasil dan Diskusi**

### **1. Konsep Dasar**

Manajemen pendidikan berbasis masyarakat merupakan proses pengelolaan pendidikan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pendukung atau penyedia sumber daya, tetapi juga sebagai mitra strategis yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait arah, tujuan, dan pengembangan program pendidikan. Keterlibatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik masyarakat setempat (Ruslan, 2024).

Pendidikan berbasis masyarakat berangkat dari pandangan bahwa masyarakat merupakan subjek utama dalam proses pendidikan. Anwar et al. (2022) menjelaskan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang tumbuh dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, Setiawan et al. (2022) menyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan proses pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara partisipatif oleh masyarakat untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan kebijakan dan keberlangsungan program pendidikan.

Melalui pendekatan partisipatif tersebut, manajemen pendidikan berbasis masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih demokratis, responsif, dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan relevansi program pendidikan terhadap kebutuhan lokal

sekaligus memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program yang dijalankan (Arifannisa, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi secara nyata dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan.

## 2. Permasalahan dan Tantangan

Manajemen pendidikan berbasis masyarakat menawarkan pendekatan yang mampu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum berjalan secara optimal. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, tetapi juga menyangkut aspek kapasitas, struktur, kelembagaan, budaya, dan distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi tantangan secara lebih sistematis agar dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

### 2.1. Tantangan Kapasitas

Salah satu kendala utama adalah rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami dan terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Literasi pendidikan yang

masih terbatas menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami peran strategis mereka dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Selain itu, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, baik di kalangan masyarakat maupun tenaga pendidik, turut menghambat pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat secara efektif (Lahitania & Muttaqin, 2025; Mesiono & Haidir, 2021). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan program edukasi publik, pelatihan penguatan kapasitas masyarakat, serta forum warga sekolah yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan tata kelola pendidikan.

### 2.2. Tantangan Struktural

Ketimpangan sumber daya antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan berikutnya. Penelitian (Dewi & Suriansyah, 2025) menunjukkan bahwa daerah perkotaan umumnya memiliki akses informasi, infrastruktur, dan dukungan pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan. Sebaliknya, wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, akses informasi yang rendah, serta minimnya dukungan sumber daya pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan apabila partisipasi masyarakat dijadikan tumpuan utama tanpa dukungan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemerataan sumber daya, memperkuat infrastruktur pendidikan, serta memberikan pendampingan khusus bagi daerah yang masih tertinggal agar kesempatan berpartisipasi dapat dinikmati secara setara.

### 2.3. Tantangan Kelembagaan

Pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat juga sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan menyebabkan program pendidikan berjalan secara parsial dan kurang terintegrasi (Sukari & Ahmadi, 2024). Selain itu, mekanisme komunikasi yang belum efektif sering kali membuat aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pembentukan tim kemitraan sekolah-masyarakat yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan perencanaan bersama sehingga setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

### 2.4. Tantangan Budaya Partisipasi

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih sering dipahami sebatas pemberian bantuan dana, tenaga, atau kehadiran dalam kegiatan sekolah. Padahal, esensi pendidikan berbasis masyarakat terletak pada keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pemahaman yang terbatas ini menyebabkan partisipasi masyarakat cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif. Untuk mengubah kondisi tersebut, sekolah dan pemerintah perlu membangun budaya partisipatif melalui forum diskusi, musyawarah rutin, dan penyebaran informasi yang transparan agar masyarakat memahami bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab dalam menentukan arah pendidikan.

### 2.5. Tantangan Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah dominasi elite atau tokoh tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian (Fuad, 2012) pada Pondok Pesantren Al-Ittifaq Bandung menunjukkan bahwa keputusan strategis masih banyak dipengaruhi oleh figur pemimpin, sehingga ruang partisipasi masyarakat menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi mengurangi prinsip demokratis yang menjadi dasar pendidikan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel melalui musyawarah yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara proporsional sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan manajemen pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh dukungan kapasitas, ketersediaan sumber daya, efektivitas kelembagaan, budaya partisipatif, dan distribusi kekuasaan yang adil. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat perlu diposisikan sebagai model kemitraan antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab

sebagai fasilitator melalui penyediaan regulasi, pendampingan teknis, penguatan kapasitas masyarakat, serta pemerataan sumber daya pendidikan. Dengan dukungan tersebut, partisipasi masyarakat dapat berkembang secara lebih bermakna dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

### 3. Relevansi dengan Konsep Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan berbasis masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep dasar manajemen pendidikan, khususnya dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Berbeda dengan manajemen pendidikan konvensional yang memusatkan pengambilan keputusan pada lembaga formal, pendekatan berbasis masyarakat memperluas setiap fungsi manajemen tersebut dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dan mitra strategis dalam setiap tahapan pengelolaan pendidikan (Raprap et al., 2026).

Pada fungsi perencanaan, masyarakat berperan memberikan masukan terkait kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lingkungan setempat melalui mekanisme seperti forum aspirasi, musyawarah warga, dan pemetaan potensi komunitas (Viola et al., 2024). Aktor yang terlibat meliputi kepala sekolah, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah lokal. Indikator keberhasilan tahap ini dapat diukur dari jumlah forum partisipasi yang terselenggara dan tingkat representasi masyarakat dalam penyusunan program sekolah.

Pada fungsi pengorganisasian, pelibatan masyarakat diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan komite sekolah, tim kerja sekolah-masyarakat, serta jejaring dengan tokoh lokal dan organisasi kemasyarakatan. Maula & Noviyanti (2024)

menunjukkan bahwa pemberdayaan komite sekolah secara aktif memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama ketika komite dilibatkan bukan hanya dalam mobilisasi dana tetapi juga dalam perumusan kebijakan sekolah. Indikator yang relevan mencakup keterlibatan masyarakat dalam keputusan strategis dan transparansi struktur organisasi sekolah kepada publik.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui dukungan tenaga, ide, fasilitas, maupun pendanaan untuk menunjang keberlangsungan program pendidikan, termasuk program literasi, kelas komunitas, dan kegiatan berbasis kebutuhan lokal. Husain et al. (2025) mencatat bahwa komite sekolah yang aktif tidak hanya hadir secara administratif, tetapi turut serta dalam pelaksanaan program nyata seperti Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusif, dengan kontribusi berupa dukungan dana, partisipasi kegiatan, dan fasilitasi komunikasi antara sekolah dan orang tua.

Pada fungsi evaluasi, masyarakat berperan dalam memberikan umpan balik melalui forum evaluasi publik, survei kepuasan, dan laporan transparansi program yang

dapat diakses warga. Wahyudin (2021) dalam penelitiannya di RA Al-Hilal Cikarang menemukan bahwa dua strategi utama yang menopang keberhasilan manajemen pendidikan berbasis masyarakat adalah budaya transparansi pengelolaan sumber daya pendidikan dan penerapan akuntabilitas dalam evaluasi program. Indikator keberhasilan pada tahap ini antara lain: frekuensi forum evaluasi publik, keterbukaan informasi anggaran sekolah, dan relevansi program dengan kebutuhan lokal yang teridentifikasi.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan berbasis masyarakat merupakan pengembangan dari prinsip manajemen pendidikan modern yang menekankan kolaborasi, desentralisasi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan secara partisipatif. Dengan demikian, pendekatan ini memperkuat implementasi manajemen pendidikan yang lebih demokratis dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat

#### 4. Implikasi terhadap Optimalisasi dan Pemberdayaan Peran Masyarakat dalam Pendidikan

Penerapan manajemen pendidikan berbasis masyarakat memberikan implikasi yang signifikan terhadap pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat, namun keduanya perlu dibedakan secara konseptual agar implementasinya tidak berhenti pada tataran wacana. Pendayagunaan masyarakat merujuk pada optimalisasi potensi yang telah dimiliki masyarakat (baik sumber daya manusia, jaringan sosial, maupun dukungan material) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, pemberdayaan merujuk pada proses peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami persoalan pendidikan, merumuskan solusi, dan mengambil keputusan secara mandiri (Hamid, 2018).

Dari sisi pendayagunaan, pelibatan masyarakat memungkinkan sekolah mengoptimalkan sumber daya lokal yang tidak selalu tersedia dari jalur pemerintah, mulai dari tenaga sukarela, ruang belajar komunitas, hingga jaringan alumni dan pelaku usaha lokal. Kondisi ini mendorong terciptanya rasa memiliki (sense of ownership) terhadap lembaga pendidikan sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih nyata dan berkelanjutan (Normina, 2016). Husain et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan

Komite yang proaktif dalam pelaksanaan program sekolah, bukan hanya dalam kontribusi dana tapi secara signifikan memperkuat ketahanan kelembagaan sekolah dalam menghadapi keterbatasan sumber daya.

Dari sisi pemberdayaan, mekanisme yang perlu dioperasionalkan meliputi: peningkatan literasi pendidikan masyarakat, pelatihan komite sekolah dalam perencanaan dan penganggaran, penyediaan akses informasi kebijakan pendidikan yang mudah dipahami, serta penyelenggaraan forum musyawarah yang inklusif dan representatif. Nurhayati et al. (2025) menjelaskan bahwa pemberdayaan melalui

pendidikan berbasis partisipasi dapat melahirkan komunitas yang lebih kritis, adaptif, dan inovatif. Namun proses ini hanya akan berjalan jika masyarakat benar-benar memiliki hak suara, bukan sekadar diundang hadir dalam setiap tahapan pengelolaan pendidikan.

Perlu ditegaskan pula bahwa tidak semua bentuk pelibatan masyarakat secara otomatis bersifat memberdayakan. Terdapat setidaknya tiga risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, partisipasi dapat menjadi beban bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rendah apabila tidak disertai dukungan negara yang memadai, misalnya dalam bentuk biaya transportasi atau waktu yang harus dikorbankan dari pekerjaan harian. Kedua, proses partisipasi berpotensi dimonopoli oleh elite lokal, tokoh yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan jaringan kekuasaan, sehingga suara masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak terdengar. Fuad (2012) mencatat bahwa dalam praktiknya pengambilan keputusan pendidikan masih sering didominasi oleh pihak tertentu, sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya bersifat demokratis. Ketiga, keterlibatan publik dapat berubah menjadi formalitas administratif jika tidak ada mekanisme umpan balik yang nyata dan berdampak pada kebijakan sekolah.

Dengan demikian, implikasi utama dari manajemen pendidikan berbasis masyarakat bukan hanya pada peningkatan efektivitas pengelolaan pendidikan, tetapi juga pada terbentuknya masyarakat yang lebih berdaya, mandiri, dan memiliki kapasitas untuk mendukung pembangunan pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini hanya dapat terwujud melalui transformasi pola hubungan antarpemangku kepentingan menuju kolaborasi yang setara, terarah, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata (Suparlan, 2022).

## 5. Strategi Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat

Keberhasilan manajemen pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh niat baik semua pihak, melainkan bergantung pada strategi implementasi yang terencana, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara setara. Terdapat beberapa strategi pokok yang dapat menjadi pijakan operasional dalam mengoptimalkan keterlibatan publik dalam pengelolaan pendidikan.

### 5.1. Penguatan Forum Partisipasi dan Dialog Publik

Strategi pertama adalah membangun dan mengaktifkan forum partisipasi yang inklusif, seperti musyawarah warga, forum komunikasi sekolah-masyarakat, dan rapat terbuka komite sekolah. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog yang

memungkinkan aspirasi masyarakat tersalurkan ke dalam perencanaan program pendidikan secara langsung. Khausar & Anwar (2023) menegaskan bahwa partisipasi komite sekolah dalam mengawasi mutu pendidikan terbukti lebih efektif ketika terdapat ruang dialog yang difasilitasi secara rutin oleh pihak sekolah, bukan sekadar pertemuan insidental. Aktor utama dalam strategi ini adalah kepala sekolah sebagai fasilitator,

komite sekolah sebagai jembatan aspirasi, dan tokoh masyarakat sebagai representasi kepentingan lokal.

## 5.2. Penguatan Kapasitas Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan instrumen utama keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas anggotanya dalam memahami kebijakan pendidikan, membaca anggaran sekolah, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Maula & Noviyanti (2024) merekomendasikan langkah-langkah konkret pemberdayaan komite sekolah, antara lain pelatihan perencanaan program, orientasi kebijakan pendidikan, dan penguatan kemampuan advokasi. Indikator keberhasilan strategi ini mencakup peningkatan keterlibatan komite dalam keputusan strategis, jumlah pelatihan yang diikuti, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga sekolah.

## 5.3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya

Keterlibatan masyarakat yang bermakna mensyaratkan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran dan program sekolah. Tanpa transparansi, partisipasi masyarakat berisiko menjadi formalitas administratif semata. Wahyudin (2021) menemukan bahwa penerapan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pendidikan berbasis masyarakat secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan aktif orang tua serta warga dalam mendukung program sekolah. Secara operasional, strategi ini dapat diwujudkan melalui papan informasi anggaran sekolah yang dapat diakses publik, laporan tahunan program yang dibagikan kepada orang tua, serta forum pertanggungjawaban program di akhir tahun ajaran.

## 5.4. Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan

Manajemen pendidikan berbasis masyarakat tidak dapat berjalan efektif jika hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan kolaborasi sistemik antara sekolah, komite sekolah, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha. Supardi et al. (2023) menemukan bahwa kemitraan yang terstruktur antara sekolah dan komite sekolah terbukti meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, khususnya ketika masing-masing pihak memiliki peran yang jelas dan mekanisme koordinasi yang terdefinisi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator regulasi dan penyedia sumber daya, sekolah sebagai pengelola teknis, dan masyarakat sebagai mitra pengawasan dan evaluasi.

## 5.5. Penerapan Indikator Keberhasilan yang Terukur

Salah satu kelemahan implementasi selama ini adalah minimnya indikator terukur untuk menilai efektivitas keterlibatan masyarakat. Strategi ini menuntut adanya penetapan indikator yang konkret, antara lain: jumlah forum partisipasi per semester, persentase warga yang menghadiri rapat komite, tingkat kepuasan orang tua terhadap

transparansi sekolah, serta relevansi program sekolah dengan kebutuhan lokal yang diidentifikasi bersama. Lestaringtyas & Miyono (2024)

menekankan bahwa manajemen berbasis masyarakat yang dilengkapi indikator terukur akan memudahkan evaluasi dan mendorong perbaikan berkelanjutan, sehingga partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat seremonial tetapi berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara nyata.

Strategi-strategi tersebut pada dasarnya dapat diimplementasikan dalam berbagai satuan pendidikan dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lembaga. Salah satu contoh penerapan manajemen pendidikan berbasis masyarakat dapat dilihat pada Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Sulthon Aulia sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya mahasiswa. Melalui berbagai program pembinaan keislaman, pengembangan karakter, dan kegiatan sosial, PPM Sulthon Aulia berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan mahasiswa tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal di perguruan tinggi, tetapi juga memperdalam pemahaman keagamaan sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, proses pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas peserta didik secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, PPM Sulthon Aulia menerapkan berbagai strategi yang sejalan dengan prinsip pendidikan berbasis masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membangun forum komunikasi dan partisipasi yang melibatkan yayasan sebagai pengelola, tokoh masyarakat setempat (RT & RW), guru, santri, alumni, serta wali santri. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi, musyawarah program, kegiatan silaturahmi, serta komunikasi rutin yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan penyampaian aspirasi. Melalui forum tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pendukung kegiatan pendidikan, tetapi juga turut memberikan masukan dalam pengembangan program dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.

Selain memperkuat partisipasi, PPM Sulthon Aulia juga berupaya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pembinaan keislaman, pelatihan kepemimpinan, pengabdian masyarakat, dan kegiatan pengembangan karakter. Di samping itu, lembaga ini menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti RT, RW, tokoh masyarakat, serta lingkungan sekitar untuk mendukung keberlangsungan program pendidikan. Kemitraan tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan yang melibatkan santri secara aktif. Evaluasi kegiatan dan musyawarah rutin juga dilakukan sebagai bentuk

akuntabilitas sekaligus upaya memastikan bahwa program yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Berdasarkan praktik tersebut, PPM Sulthon Aulia menunjukkan bahwa implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat dapat berjalan secara efektif melalui sinergi antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Keterlibatan yayasan, guru, santri, alumni, wali santri, serta masyarakat sekitar tidak hanya mendukung keberlangsungan program pendidikan, tetapi juga memperkuat proses pemberdayaan mahasiswa sebagai peserta didik. Melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif, PPM Sulthon Aulia mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik, karakter, dan spiritualitas secara seimbang sebagai bekal kehidupan dunia maupun akhirat.

## **Simpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendekatan strategis yang mengubah posisi masyarakat dari sekadar objek atau penerima kebijakan menjadi mitra aktif dan subjek utama dalam seluruh proses pengelolaan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Temuan kajian menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan publik dapat dicapai melalui lima strategi implementasi utama yang berbasis fungsi manajemen pendidikan: (1) penguatan forum partisipasi dan dialog publik yang terstruktur; (2) pemberdayaan kapasitas komite sekolah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; (3) penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pendidikan; (4) sinergi lintas pemangku kepentingan antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah; serta (5) penetapan indikator keberhasilan keterlibatan masyarakat yang terukur. Kelima strategi ini terbukti berkontribusi terhadap tumbuhnya rasa memiliki (*sense of ownership*), kepercayaan publik, dan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan lokal, sebagaimana diilustrasikan secara empiris oleh praktik manajemen pendidikan berbasis masyarakat di PPM Sulthon Aulia. Namun, keberhasilan strategi-strategi tersebut mensyaratkan penguatan kapasitas masyarakat, dukungan regulasi dan pendampingan dari pemerintah, transparansi tata kelola, serta pemerataan sumber daya pendidikan, terutama di wilayah yang masih tertinggal.

Keterbatasan penelitian ini perlu diakui secara eksplisit. Studi kasus yang disintesis, termasuk studi empiris di PPM Sulthon Aulia, merupakan kasus tunggal yang tidak dapat digeneralisasi secara luas ke seluruh konteks pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, efektivitas strategi yang dibahas belum diuji secara sistematis melalui penelitian eksperimental maupun evaluatif. Berdasarkan keterbatasan tersebut, kajian ini merekomendasikan dua agenda penelitian lanjutan. Pertama, studi empiris tentang implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat di berbagai satuan pendidikan, seperti sekolah formal, PKBM, dan pesantren, dengan perbandingan antara

konteks perkotaan dan pedesaan untuk menghasilkan temuan yang lebih representatif. Kedua, penelitian evaluatif mengenai efektivitas komite sekolah dan forum warga dalam meningkatkan keterlibatan publik secara substantif, dengan menggunakan indikator terukur yang dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan pendidikan.

## Referensi

- Anwar, H., Sarnoto, A. Z., & Habiburrahmanuddin, N. (2022). Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Al-Qur'an. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 1453–1470. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.3074>
- Ariani, & Sholeh, N. (2025). Manajemen Pendidikan Partisipatif: Sinergi Sekolah dan Masyarakat dalam Implementasi Life Skills untuk Mutu Berkelanjutan. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 14(2), 556–569. <https://doi.org/10.36668/jal.v14i2.1565>
- Arifannisa. (2025). Manajemen Pendidikan Berbasis Komunitas: Peran Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat, dan Kepemimpinan Sosial dalam Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan di Wilayah Tertinggal. *JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1546–1558. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i4.11597>
- Budiyanto, M. N., Syafebri, A., & Faturrahmaan, A. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif dan Aplikasi Digital Kontemporer Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Media Penerbit Indonesia.
- Cahyani, A., Nurhaningsih, T., Karnati, N., & Rahmawati, D. (2024). Kuliah Kerja Nyata Sebagai Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(2), 19–29. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i2.726>
- Dewi, R. S., & Suriansyah, A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Mutu Pendidikan: Studi Kualitatif pada Sekolah di Pedesaan dan Perkotaan. *ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 33–43. <https://doi.org/10.51878/elementary.v5i1.4158>
- Fuad, N. (2012). Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren (Studi Kasus Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pesantren Al-Ittifaq Bandung, Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.21009/jmp.v3i1.2437>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*.
- Husain, R., Zubaidi, M., Gobel, J. P., & Amain, P. J. (2025). Analisis Optimalisasi Peran Komite Sekolah Dalam Mendukung Program-Program Sekolah. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 370–376. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5058>
- Khausar, K., & Anwar, S. (2023). Partisipasi Komite Sekolah dalam Mengawasi Mutu

- Pendidikan. *Jurnal Genta Mulia*, 14(2). <https://doi.org/10.61290/gm.v14i2.571>
- Lahitania, Z., & Muttaqin, M. I. (2025). Konsep dan Implementasi Kepemimpinan Pendidikan Efektif dalam Mewujudkan Sekolah Berprestasi. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 196–206. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.315>
- Lestaringtyas, & Miyono, N. (2024). Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Komite Serta Tantangan Pelaksanaannya. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 5(1), 077–086. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i1.225>
- Maula, F. M., & Noviyanti, S. F. (2024). Empowering of School Committees: Concrete Steps to Improve The Quality of Education. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 689–702. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i2.7116>
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.88>
- Normina, N. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *Ittihad*, 14(26). <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>
- Nurhayati, S., Septikasari, D., Judijanto, L., Susanto, D., Tarrapa', S., Sudadi, S., Setiyana, R., Willdahlia, A. G., Ramli, A., & Zamroni, Z. (2025). *Paradigma Baru dalam Pendidikan Abad 21*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Raprap, W. P., Rustiyana, R., Suharno, W. A., & Haryono, H. (2026). *Manajemen Pendidikan Sekolah: Pengantar, Prinsip, Manajemen, Sistem Penjaminan Mutu dan Evaluasi Berbasis Digital*. Star Digital Publishing.
- Ruslan, R. (2024). Model Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(2), 87–100. <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i2.130>
- Setiawan, D., Aziz, S. A., & Hilman, C. (2022). Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 74–84. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.217>
- Sukari, S., & Ahmadi, F. (2024). Menilik Tantangan dan Strategi Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarakat. *TSAQOFAH*, 4(6), 4087–4098. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.4103>
- Supardi, S., Qurtubi, A., & Fatoni, H. (2023). Kemitraan Sekolah dan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP IT Raudhatul Jannah Cilegon. *Journal on Education*, 5(4), 11196–11203. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2053>
- Suparlan. (2022). *Manajemen Berbasis Sekolah: Dari Teori sampai dengan Praktik*. Bumi

Aksara.

Viola, M. A., Vilanti, F. A., Rahman, I. A., & Setiyadi, B. (2024). *Analisis Kurikulum Berbasis Masyarakat: Memanfaatkan Kurikulum Muatan Lokal Untuk Pendidikan yang Kontekstual*. 12(1). <https://doi.org/10.24269/dpp.v12i1.9636>

Wahyudin, U. R. (2021). Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 652–663. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1357>